RELEVANSI KONSEP JINAYAH TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM MSDM

Mufti Fahrizal¹, Muhlisah Lubis²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: muftifahrizalhrp@stain-madina.ac.id, lubismuhlisah14@gmail.com

ABSTRACT

Corruption and abuse of authority are serious problems in various sectors, including in Human Resources Management (HRM). Unethical actions such as bribery, nepotism and data manipulation can damage the integrity of an organization and reduce public trust in the institution. This article examines the relevance of the concept of jinayah in Islamic law to preventing corruption and abuse of authority in HRM. The concept of jinayah, which includes criminal acts that harm society, teaches basic principles such as justice ('adl), trust (honesty), and accountability (mas'uliyah). The application of these principles in HRM can prevent corrupt practices and abuse of authority by enforcing appropriate morals and laws. Through an approach based on Islamic ethics, this article shows how fair, transparent and responsible human resource management can be established by utilizing the concept of jinayah as a guide. In this context, preventing corruption and abuse of authority does not only require a legal approach, but also a moral approach that is able to uphold justice and integrity in the organization.

Keywords: *Jinayah, corruption, abuse of authority, Human Resource Management, Islamic ethics, accountability, justice*

ABSTRAK

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan masalah serius di berbagai sektor, termasuk dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Tindakan tidak etis seperti penyuapan, nepotisme, dan manipulasi data dapat merusak integritas organisasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Artikel ini mengkaji relevansi konsep jinayah dalam hukum Islam dengan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam HRM. Konsep jinayah yang meliputi tindak pidana yang merugikan masyarakat mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), kepercayaan (kejujuran), dan akuntabilitas (mas'uliyah). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam HRM dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan menegakkan moral dan hukum yang tepat. Melalui pendekatan yang berlandaskan etika Islam, artikel ini menunjukkan bagaimana manajemen sumber daya manusia yang adil, transparan dan bertanggung jawab dapat dibangun dengan memanfaatkan konsep jinayah sebagai panduan. Dalam konteks ini, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan moral yang mampu menjunjung tinggi keadilan dan integritas dalam organisasi.

Kata kunci: Jinayah, korupsi, penyalahgunaan wewenang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Etika Islam, akuntabilitas, keadilan

PENDAHULUAN

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi masalah serius yang dapat merusak integritas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. (Riauroikha et al., 2023). Dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), penyalahgunaan wewenang dapat muncul dalam bentuk manipulasi data, nepotisme dalam promosi, atau suap dalam proses

rekrutmen. Hal ini merugikan organisasi, mengurangi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, pencegahan terhadap praktik-praktik tidak etis ini sangat penting. Konsep jinayah dalam hukum Islam memberikan kerangka moral dan hukum yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah ini. Jinayah, yang mencakup tindak pidana yang merugikan masyarakat, mengajarkan pentingnya keadilan dan pertanggungjawaban bagi pelaku tindakan yang merugikan orang lain.(Ichwanto, 2018). Dalam konteks MSDM, tindakan seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan moral, yang membutuhkan penanganan yang sesuai.(Atmoko & Syauket, 2022).

Prinsip-prinsip dasar dalam jinayah, seperti kejujuran (amanah), keadilan ('adl), dan akuntabilitas (mas'uliyah), memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam MSDM. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan budaya organisasi yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, konsep jinayah dapat memberikan kontribusi penting dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang di bidang MSDM.(Juhaeni, 2021).

Relevansi Konsep Jinayah terhadap Pencegahan Korupsi dalam konteks pencegahan korupsi, prinsip jinayah mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan tegas.(Abdulah Pakarti et al., 2023). Jika korupsi atau penyalahgunaan wewenang dilakukan dalam ranah MSDM, maka pelaku bisa dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini menekankan pentingnya keadilan dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi konsep jinayah juga relevan dengan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan MSDM. Dengan menerapkan prinsip ini, setiap tindakan yang melibatkan sumber daya manusia harus diawasi dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pemimpin organisasi harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan karyawan, baik dalam rekrutmen, promosi, maupun pemberian fasilitas lainnya.(Parizi & Kustiwa, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menggali hubungan antara konsep jinayah dan praktik pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam MSDM, dengan harapan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan

untuk menciptakan sistem manajerial yang adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Meskipun banyak penelitian telah mengkaji pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, studi yang secara spesifik menghubungkan konsep jinayah dengan MSDM masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip jinayah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks MSDM modern. Dengan latar belakang ini, artikel dapat melanjutkan untuk membahas secara lebih mendalam penerapan prinsip jinayah dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor MSDM, serta dampak positifnya bagi organisasi dan masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang hubungan antara konsep *jinayah* dan praktik pencegahan korupsi dalam MSDM. Pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, serta bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi budaya organisasi dan kebijakan MSDM dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan referensi-referensi hukum Islam yang berkaitan dengan konsep *jinayah* dan etika Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan menyusun kerangka teori yang mendalam mengenai pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Data yang dikumpulkan dari literatur akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik.(Heriyanto, 2018). Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan penerapan konsep *jinayah* dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dalam MSDM. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana prinsip *jinayah* dapat mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas tentang relevansi konsep *jinayah* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam MSDM .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi dan Prinsip Dasar Konsep Jinayah dalam Islam

Dalam hukum Islam, *jinayah* merujuk pada pelanggaran yang melibatkan tindakan kriminal atau pelanggaran etika yang melanggar hak individu atau masyarakat. (Alfariszi & Ahsan, 2024). Konsep ini memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang bertujuan menjaga tatanan sosial, melindungi hak, dan menegakkan keadilan (*'adl*). Tindakan seperti pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang termasuk dalam kategori *jinayah*. Prinsip-prinsip *jinayah* mencakup kejujuran (*amanah*) yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan integritas, sedangkan Akuntabilitas (*mas'uliyah*) yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat dan keadilan (*'adl*), Memberikan hak sesuai ketentuan tanpa diskriminasi.

2. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam MSDM

Korupsi dalam MSDM sering terjadi dalam bentuk suap untuk mendapatkan posisi, nepotisme dalam rekrutmen, atau manipulasi data karyawan untuk keuntungan pribadi.(Fatimah et al., 2023). Penyalahgunaan ini melanggar prinsip keadilan dan menciptakan ketidakpercayaan dalam organisasi. Dalam perspektif Islam, korupsi tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum positif tetapi juga dosa besar karena melanggar amanah yang diberikan Allah SWT.

Penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi ketika pemimpin atau manajer memiliki kontrol yang tidak seimbang atas pengambilan keputusan dalam MSDM. Hal ini menciptakan peluang untuk favoritisme, nepotisme, dan eksploitasi sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, pada suatu organisasi sangat perlu menekankan pentingnya struktur organisasi yang demokratis dan kebijakan berbasis meritokrasi, dalam penyalahgunaan wewenang sering terjadi karena kurangnya akuntabilitas dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia, sehingga organisasi harus menerapkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan transparansi dalam setiap keputusan MSDM.(Singh, 2022)

3. Relevansi Konsep Jinayah dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Konsep *jinayah* memberikan kerangka kerja moral dan hukum untuk mencegah korupsi dalam MSDM melalui langkah-langkah berikut:

- a) Penerapan Kejujuran dan Transparansi dalam rekrutmen dan promosi, prinsip *amanah* mengharuskan pengelola MSDM bertindak secara adil dan transparan. Proses berbasis meritokrasi, tanpa intervensi nepotisme atau suap, mencerminkan implementasi konsep ini.
- b) Penegakan Hukum dan Sanksi Dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelanggaran *jinayah* berfungsi sebagai pencegahan (*zawajir*) dan penebusan dosa (*jawabir*). Penerapan hukuman yang tegas untuk penyalahgunaan wewenang dalam MSDM menciptakan efek jera bagi pelaku dan menjaga integritas organisasi.
- c) Penguatan Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam melindungi pelapor dari intimidasi dan memastikan keadilan ditegakkan.

4. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam MSDM

Integrasi nilai-nilai Islam dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan spiritual Islam.(Amaliyah et al., 2024). Pendekatan ini membantu organisasi untuk mencapai keseimbangan antara keberhasilan duniawi dan tanggung jawab akhirat.

Pencegahan korupsi dalam MSDM tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etika Islam. Prinsip seperti *ihسان* (berbuat baik) dan *taqwa* (kesadaran akan pengawasan Allah) mendorong karyawan untuk bertindak dengan integritas, meskipun tanpa pengawasan langsung. Beberapa langkah praktis yang dapat diadopsi:

- a) Mengadakan pelatihan etika Islam bagi manajer dan karyawan.
- b) Menyusun kebijakan MSDM yang mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
- c) Menanamkan budaya organisasi yang berorientasi pada kejujuran dan transparansi.

5. Kritik dan Tantangan Penerapan Konsep Jinayah

Kendala Budaya dan Sistemik di beberapa organisasi dimana penerapan nilai-nilai Islam sering terkendala oleh budaya nepotisme dan lemahnya sistem pengawasan internal serta kurangnya pemahaman tentang konsep jinayah oleh seorang pemimpin organisasi dan sering kali tidak memahami konsep *jinayah* secara mendalam, sehingga implementasinya tidak optimal.

Kritik dan tantangan terhadap penerapan konsep *jinayah* muncul dari berbagai perspektif, mulai dari isu hak asasi manusia hingga adaptasi terhadap kompleksitas dunia modern. Namun, konsep *jinayah* tetap relevan jika diadaptasi dengan cara yang kontekstual, adil, dan inklusif. Nilai-nilainya seperti keadilan, akuntabilitas, dan amanah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam menangani berbagai tantangan sosial, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang, asalkan diterapkan dengan bijak dan sesuai dengan tuntutan zaman.

6. Rekomendasi untuk Penerapan Konsep Jinayah dalam MSDM

Pendidikan dan Pelatihan sangat di perlukan bagi seorang pemimpin dengan adanya pelatihan terhadap pemimpin, selain seorang pemimpin perlu memahami konsep jinayah maka karyawan juga perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep *jinayah* dan penerapannya dalam MSDM, dengan adanya penguatan sistem dan kebijakan organisasi perlu menyusun kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif, maka perlu diadakan Kolaborasi dengan Institusi Islam dengan cara melakukan konsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam dapat membantu organisasi menerapkan prinsip *jinayah* secara lebih efektif.

Penerapan konsep *jinayah* dalam MSDM dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, amanah, dan akuntabel. Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi ini, organisasi dapat membangun budaya yang berfokus pada integritas dan transparansi, mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa kebijakan SDM mendukung prinsip-prinsip moral yang kuat.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menciptakan budaya anti-korupsi di dalam suatu organisasi.

Pendidikan dan pelatihan berfungsi untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan keterampilan karyawan dalam menghadapi dan mencegah praktik korupsi, baik dalam aspek administratif, finansial, maupun dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kewenangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mencegah korupsi melalui pendidikan dan pelatihan:

- a) Pendidikan Etika dan Integritas dengan membangun pemahaman tentang pentingnya etika dan integritas dalam bekerja dan mengajarkan nilai-nilai moral yang mendasari pencegahan korupsi.
- b) Pelatihan tentang Identifikasi dan Pencegahan Korupsi yaitu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk korupsi dan bagaimana mengidentifikasinya serta melatih karyawan agar mampu mengenali tanda-tanda penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi lainnya di tempat kerja.
- c) Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dengan cara memberikan keterampilan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel supaya dapat mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan atau negara yang dapat memicu korupsi.
- d) Pelatihan Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab dengan membekali pemimpin dan manajer dengan kemampuan untuk memimpin dengan integritas dan bertanggung jawab dan mengajarkan mereka bagaimana membangun budaya anti-korupsi dalam tim atau organisasi mereka.
- e) Program Penghargaan dan Sanksi dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dengan memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang menunjukkan perilaku anti-korupsi yang baik dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti melakukan praktik korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep jinayah dalam hukum Islam sangat relevan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam MSDM. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti

keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas, organisasi dapat menciptakan sistem MSDM yang lebih transparan dan beretika. Namun, implementasinya memerlukan komitmen kuat dari pemimpin organisasi dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Konsep jinayah relevan tidak hanya sebagai pendekatan preventif tetapi juga sebagai solusi holistik untuk membangun MSDM yang berintegritas dan beretika. Namun, penerapan konsep ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin organisasi, pendidikan yang mendalam tentang nilai-nilai Islam, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Dengan demikian, organisasi yang mengadopsi nilai-nilai jinayah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, adil, dan produktif.

Penerapan nilai-nilai jinayah tidak hanya berdampak pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga membangun kepercayaan di antara karyawan dan manajemen, sekaligus memperkuat fondasi organisasi yang berbasis pada moralitas dan tanggung jawab. Namun, upaya ini memerlukan komitmen kuat dari para pemimpin, pendidikan yang berkelanjutan, dan kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam secara holistik dalam setiap aspek MSDM. relevansi konsep jinayah dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa solusi berbasis etika dan hukum Islam mampu menjadi pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan MSDM yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan sumber daya manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan organisasi modern.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mendalami konsep jinayah dalam konteks MSDM, penting untuk memperluas kajian pada organisasi yang telah mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian dapat difokuskan pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan Islam, atau perusahaan berbasis syariah yang memiliki kebijakan etika berbasis nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas. Studi kasus di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, atau negara-negara Timur Tengah, dapat memberikan wawasan tentang penerapan praktis konsep jinayah dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penelitian lapangan di organisasi multinasional yang mengadopsi pendekatan etika berbasis agama juga dapat menjadi referensi untuk memahami relevansi nilai-nilai Islam di tengah keberagaman budaya dan kebutuhan modern. Peneliti juga disarankan untuk melibatkan

karyawan, manajemen, dan pembuat kebijakan dalam wawancara atau survei untuk mendapatkan data empiris yang lebih mendalam tentang efektivitas dan tantangan implementasi nilai-nilai jinayah dalam MSDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H., Utama, S. M., Farid, D., Mabruhi, K. A. K., & Nu'man, M. H. (2023). Peran Hukum Islam Dalam Pencegahan Korupsi. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 17–34. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12450>
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122–132. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>
- Amaliyah, R., Rindaningsih, I., & Sidoarjo, U. M. (2024). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA Human. *T S A Q O F A H : Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(1), 726–742. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4597>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Fatimah, E. S., Novianti, F., Rohalia, S., Amalia, S., & Hardiansyah, M. A. (2023). Analisis Kasus Suap Recruitment Karyawan Pabrik Perspektif Sosiologi Politik Dan Kekuasaan. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(2), 1111–1120. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1340>
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Ichwanto, A. M. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 41–48. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386/1169>
- Parizi, E. A. Al, & Kustiwa, A. (2024). Peran Pemimpin Dapat Menentukan Kebijakan Kerja. *MANAJEMEN : JURNAL EKONOMI*, 6(1), 159–167. <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/JEUSI/article/download/74/76/249>
- Riauroikha, H. S., Juniati, R., Simanjuntak, V. A., Sitohang, J., Efridadewi, A., Raja, M., & Haji,

A. (2023). Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia). *Unes Law Review*, 6(1), 2790–2798. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Singh, D. (2022). The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States. *Laws*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/laws11050069>